

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Chazawi Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia(edisi revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hamzah Andi, 2007, *Korupsi Melalui Hukum Pidana* ), jakarta , Raja Grafindo Persada,
- Makawimbing, Herlond Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta Thafa Media.
- Mahrus Ali 2013, *asa, teori & praktek hukum pidana korupsi*, Yogyakarta, UII Press
- Prodjohamidjojo Martiman, 2001, *penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju.
- Pardede Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, GENTAPublishing.
- Yanuar, Purwaning.M, 2007, *pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan konvensi PBB Anti korupsi 2003 dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung, Alumni.

### Jurnal :

- Dahlan “ Disoortasi beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut sistem pembuktian” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol X No.1 (januari - juni)
- Desly S “pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” *Lex Crimen*, Vol IV, No. 3 (Mei 2015)
- Emy Julia T “ Hak remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi” *Lex Crimen*, Vol III No.1 (Januari - Maret, 2014)
- Fani Fadila Rotinsulu “ Tinjauan Yuridis tentang pembuktian terbalik mengenai pengembalian kerugian keuangan negara menurut Undang – Undang tindak pidana korupsi edisi 1 ” *Jurnal Ilmu hukum Legal Opinion*, Vol II No.2 (Januari Tahun 2014)
- Happy Febriana Hariyani, Dominicus Savio, Alla Asmara,”analisis faktor faktor yang mempengaruhi korupsi di kawasan asia pasifik” *Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan*, Vol V, No.2 ( Desember 2016)
- M. aris purnomo, Eko soponyono, “Rekonseptualisasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh polri dalam rangka efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi” *Jurnal Law Reform : program studi maister ilmu hukum universitas diponegoro*, Vol XI No 2 (Maret 2015)

- Marcella Elwina Simandjuntak “ Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Ilmu hukum MMH*, Vol 42 No.1 (Juni Tahun 2013)
- Marsella Tillaar “ Pengaturan pembuktian terbalik menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan astas Undang – Undang No 31 Tahun 1999” *Lex Crimen*, Vol V No.7 (September, 2016)
- Michael Julnius C “ Pengembalian kerugian negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi” *Lex Crimen*, Vol IV No 2 (April 2015)
- Muhammad arif Fauzi, Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro “ eektivitas pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi” *Diponegoro Law Journal*, Vol V No.3 ( September 2016)
- Nurasia Tanjung “ Pembuktian terbalik atas harta kekayaan seseorang tersangka korupsi” *Lex Crimen*, Vol V No.2 (Februari, 2016)
- Nur Hayati, Andrea Reynaido “ Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan secara tidak sukarela berdasarkan undang – undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi” *Lex Jurnalica*, Vol VII No.1 (Desember, 2009)
- Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum I*, Vol I No.1 (Januari 2017)
- Rixy Fredo S “ Suatu kajian tentang kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi(Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999)” *Lex Crimen*, Vol IV No.5 (Juli, 2015)
- Siahaya, Michael Julnius Christophher. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen II*, Vol VI No.1 (Juli, 2015).
- Zebua, Frans Rudy Putra, Iman Jauhari, and Taufik Siregar. "Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)." *JURNAL MERCATORIA II* Vol II No.1 (Juli, 2017)

#### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :**

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang No. 21 tahun 2002 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara